

Strategi Pengembangan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Potensi Sumberdaya

Vanya Benita, Nisa Anggilia, Mega Safitri, Qonitah Berliana, Regyna Renata
Universitas Ngudi Waluyo

vanyabenita04@gmail.com, nisaanggilia8@gmail.com, mezasaf2112@gmail.com, qonitabella15@gmail.com,
regynarenata@gmail.com

Abstract. Village development had a significant tendency to be handled uniformly by the central government throughout the New Order era. Village development programs are more top-down in nature. Village development was increasingly delegated to the community itself throughout the reform era. Central and local governments take on facilitator positions and functions, offering financial support, mentoring and supervision. Many initiatives to reduce poverty have been undertaken, including the Assistance Program for Disadvantaged Communities and Education for Presidents of Disadvantaged Villages. Village development programs are more bottom-up or a mixture of bottom-up and top-down. This research is included in qualitative research, namely research that does not use mathematical calculations, statistics and so on, but uses scientific emphasis or findings that cannot be achieved using statistical procedures or other methods of quantification. In spurring economic growth, economic policy must embrace a new paradigm where people's economic empowerment must be the main concern. Because most people in rural areas live in the agricultural sector and this sector still makes a large contribution to the regional economy, empowering the people's economy also means building a better rural economy. Industrial development must pay attention to backward linkages with the agricultural sector or primary sector, while forward linkages must pay attention to processing to increase added value and good marketing so that the products produced are not wasted.

Keywords: Community Economy, Village Development, Economic Strengthening

Abstrak. Pembangunan desa memiliki kecenderungan yang signifikan untuk ditangani secara seragam oleh pemerintah pusat sepanjang era Orde Baru. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down. Pembangunan desa semakin dilimpahkan kepada masyarakat itu sendiri sepanjang era reformasi. Pemerintah pusat dan daerah mengambil posisi dan fungsi fasilitator, menawarkan dukungan keuangan, pendampingan, dan pengawasan. Banyak inisiatif untuk mengurangi kemiskinan telah dilakukan, termasuk Program Bantuan Masyarakat Tertinggal dan Pendidikan Presiden Desa Tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat bottom-up atau campuran antara bottom-up dan top-down. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar di daerah pedesaan rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pedesaan dengan lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (backward linkage) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (forward linkage) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Pengembangan Desa, Penguatan Ekonomi

LATAR BELAKANG

Kesejahteraan masyarakat pada hakekatnya merupakan tujuan pembangunan nasional, seperti halnya Negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menanamkan kewarganegaraan pada rakyat, dan ikut menegakkan ketertiban dunia.[1]

Pembangunan desa tertinggal merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan desa dengan masyarakat pedesaan yang kualitas hidupnya setara atau tidak jauh dengan masyarakat Indonesia lainnya menjadi desa yang maju dengan masyarakat pedesaan. Komunitas ini saat ini memiliki berbagai masalah sosial ekonomi dan keterbatasan fisik.[2]

Pembangunan desa memiliki kecenderungan yang signifikan untuk ditangani secara seragam oleh pemerintah pusat sepanjang era Orde Baru. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down. Pembangunan desa semakin dilimpahkan kepada masyarakat itu sendiri sepanjang era reformasi. Pemerintah pusat dan daerah mengambil posisi dan fungsi fasilitator, menawarkan dukungan keuangan, pendampingan, dan pengawasan. Banyak inisiatif untuk mengurangi kemiskinan telah dilakukan, termasuk Program Bantuan Masyarakat Tertinggal dan Pendidikan Presiden Desa Tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat bottom-up atau campuran antara bottom-up dan top-down.

Rencana pembangunan desa terpadu Orde Baru, yang berupaya membakukan tatanan kehidupan desa, didasarkan pada konsep pembangunan desa. Ini melibatkan penggabungan beberapa sektor ke dalam desa. Mobilitas fisik dan sosial masyarakat desa telah berubah secara signifikan sebagai akibat penerapan pendekatan pembangunan desa ini.[3]

Negara Indonesia telah berkembang di banyak sektor selama 70 tahun terakhir, namun tanpa disadari telah meninggalkan persoalan pembangunan di pedesaan. Ketimpangan antardaerah diperparah oleh pembangunan yang selama ini lebih mengutamakan perluasan ekonomi. Ketika wilayah Hiterland mengalami pengurasan sumber daya yang tidak berkelanjutan, investasi dan sumber daya terserap dan terkonsentrasi di kota-kota dan pusat pertumbuhan. Contoh ketimpangan antara desa dan kota, Indonesia timur dan barat, serta Jawa dan luar Jawa.[4]

Atmojo menegaskan bahwa pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah karena mengandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya dapat langsung mempengaruhi kepentingan sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di perdesaan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. [5]

Menurut Kancana Sebuah perencanaan skenario merupakan salah satu alternatif untuk menjalankan sebuah perencanaan.[6] Skenario perencanaan adalah cara lain untuk membayangkan masa depan. Salah satu kunci agar suatu tempat berkembang di masa depan adalah memahami lingkungan dan mengembangkan strategi yang tepat. Tema dan tantangan

penting dalam perencanaan strategis termasuk mengetahui apa yang diketahui dan tidak diketahui tentang masa depan, menarik hubungan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan bagaimana kita bertindak berdasarkan pemahaman ini. Untuk memaksimalkan sumber daya dan kontribusi para pelaku pembangunan untuk meningkatkan kebahagiaan manusia, karya ini mengembangkan perencanaan skenario dengan isu-isu pembangunan di desa-desa yang belum berkembang.

METODE

Secara keseluruhan jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi.[7] Bilamana terdapat ilustrasi yang menunjukkan data-data berupa angka tabulasi, hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mempertajam analisa dan memperkuat argumentasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk interpretasi, gambaran, dan lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena.[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kendala Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Pembangunan ekonomi pedesaan terutama di daerah yang terpencil (tertinggal) tidak terlepas dari pembangunan sektor pertanian. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat pedesaan (sekitar 80 persen) mencari nafkah dari sektor pertanian yakni: perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura. Apabila ingin memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan salah satu prioritasnya adalah pengembangan sektor pertanian yang berbasis agribisnis. Untuk jenis agribisnis skala besar seperti perkebunan boleh dikatakan tidak banyak kendala, karena sektor perkebunan yang dikembangkan selama ini berorientasi ekspor yang dikelola oleh perusahaan besar. Namun yang jadi masalah adalah pengembangan ekonomi pedesaan dari usahatani skala kecil yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.[9]

Dalam pengembangan sektor pertanian skala kecil tersebut masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasiskan

agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain: [10]

- a. lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani adalah modal. Besar-kecilnya skala usaha yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal bagi masyarakat pedesaan masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha sebelumnya. Untuk memodali usaha selanjutnya masyarakat desa (petani) terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usaha tani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjatuh pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan pihak petani.
- b. ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah di pedesaan sebagai faktor produksi utama dalam pertanian makin bermasalah. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Dari sisi lain mengakibatkan terjadinya pembagian penggunaan tanah untuk berbagai subsektor pertanian yang dikembangkan oleh petani.
- c. pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Sarana produksi sangat diperlukan dalam proses produksi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pengadaan sarana produksi di pedesaan itu bukan hanya menyangkut ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, tetapi yang lebih penting adalah jenis dan kualitasnya. Oleh karena itu pengadaan sarana produksi ini perlu direncanakan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan pada waktu yang tepat.
- d. terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Usaha pertanian di pedesaan merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Petani yang bertindak sebagai manajer dan pekerja pada usaha taninya haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan berbagai faktor masukan

usaha tani, sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang dilakukan.

- e. lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi (top down) dan panyaluran inspirasi (bottom up) para anggotanya. Dalam pertanian organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok tani. Selama ini kelompok tani sudah terbukti menjadi wadah penggerak pengembangan pertanian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat kelompok tani dalam hal memudahkan koordinasi, penyuluhan dan pemberian paket teknologi.
- f. kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri. Ada dua hal yang dapat dilihat berkaitan dengan sumberdaya manusia ini, yaitu jumlah yang tersedia dan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Kedua hal ini sering dijadikan sebagai indikator dalam menilai permasalahan yang ada pada kegiatan pertanian.

2. Penguatan Potensi Desa Melalui Sektor pertanian

Menurut Soleh potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[4]

Menurut Soleh selanjutnya potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembagalembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara singkat potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut: [4]

- a. Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa.

- b. Potensi Nonfisik, Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri.

Menurut PP Nomor 78 Tahun 2014, daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pembangunan daerah tertinggal adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai bentuk afirmasi kebijakan pembangunan di daerah pinggiran termasuk didalamnya daerah tertinggal perlu dilakukan langkah-langkah percepatan. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mengandung arti keberpihakan dan penajamaan terhadap pembangunan daerah tertinggal di bidang perencanaan, pendanaan dan pembiayaan serta penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal.

Pada hakikatnya, daerah tertinggal memiliki potensi sumberdaya yang besar, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga masih mempunyai ketergantungan yang kuat dengan daerah luar.[11] Penetapan daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Hal inilah yang mendasari diperlukannya upaya pembangunan daerah tertinggal yang terencana dan sistematis agar kesenjangan antara daerah tertinggal dan non tertinggal dapat semakin dikurangi.[12] Pembangunan pedesaan seharusnya berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, yaitu adanya keterlibatan stakeholders, karena setiap pihak memiliki sumberdaya dan peran yang biasa didayagunakan secara proposional sekaligus mengubur paradigma lama yang berasumsi bahwa pemerintah berperan sebagai pemasok atau penyedia, dan perannya digantikan oleh fasilitator serta pemberdaya masyarakat.[13]

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar di daerah pedesaan rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pedesaan dengan

lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (backward linkage) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (forward linkage) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia.

Pengembangan sektor pertanian di pedesaan harus diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis di daerah. Sektor pertanian (agribisnis) sebagai sektor ekonomi rakyat di pedesaan memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas. Ketimpangan pembangunan pada masa lalu lebih memihak kepada sektor ekonomi perkotaan yaitu industri dan jasa, sementara ekonomi pedesaan yakni pertanian terabaikan. Tidak bisa dipungkiri, sejak krisis ekonomi tahun 1998 sektor pertanian memperlihatkan perubahan ekonomi di pedesaan menjadi lebih baik karena ditopang oleh komoditas yang berorientasi ekspor.

Pembangunan ke depan tidak bisa meremehkan pembangunan pedesaan melalui pengembangan sektor pertanian. Hal tersebut disebabkan sektor pertanian mempunyai peluang untuk dikembangkan di masa datang, antara lain:

- a. Penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis;
- b. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan
- c. Perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Harapan masa depan sektor pertanian tersebut tidak bisa diraih dengan begitu mudahnya. Keberhasilan sektor pertanian juga tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan agribisnis sebagai investasi dan penggerak pasar, dan partisipasi masyarakat tani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya. Selain dari ketiga komponen tersebut, di lapangan ditemukan kendala yang dihadapi oleh pelaku usahatani berupa adanya mafia pemasaran produk pertanian. Apakah produk usahatani skala kecil maupun skala besar. Pada skala kecil di pedesaan

ditemukan mafia pemasaran hasil pertanian yang dilakukan oleh pedagang pengumpul (istilah pedesaan toke) tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Mereka ini mempunyai kekuatan untuk mengendalikan harga di tingkat petani dengan berbagai dalih/ alasan. Sementara di tingkat skala besar bentuk mafia pemasaran lebih penekanan kepada kekuatan modal dan kekuasaan pasar dan kartel produk pertanian.

3. Program Pembangunan Desa

Sejalan dengan pengembangan ekonomi Indonesia yang bertumpu kepada ekonomi kerakyatan, maka pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi harus berbasis kerakyatan. Pembangunan ekonomi terutama di pedesaan dalam rangka mengangkat marwah, derajat, harkat, martabat masyarakat pedesaan sebagai upaya mewujudkan program pengetasan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang mobilitas barang dan penduduk desa-kota. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan ketiga aspek tersebut.

a. Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan).

Program kemiskinan merupakan pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif dan mendasar dalam tataran kesejahteraan dan harkat yang manusiawi, oleh karena sekalipun kemiskinan merupakan fenomena ekonomi namun memberikan konsekwensi yang kuat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat yang mengalami kemiskinan tersebut menjadi rendah nilai-nilai kemanusiaannya sehingga dalam kehidupannya kurang bermarwah. Khusus untuk daerah tertinggal pemilikan aset produktif seperti lahan sangat tidak adil, hal ini menyebabkan terjadi ketimpangan pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Dari hasil pengamatan terlihat penguasaan asset produktif (lahan) di pedesaan lebih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dan orang kota. Dampak dari semuanya ini terhadap mekanisme pasar yang dipengaruhi secara signifikan oleh aspek permodalan dan kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin. Masyarakat lebih banyak berhadapan dengan pasar yang bersifat monopsoni.

b. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pengetasan Kebodohan).

Kebodohan sebagai cerminan dari rendahnya mutu sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM sangat menentukan perubahan dan percepatan

pembangunan disuatu daerah. Apabila kualitas SDM rendah, maka masyarakat akan sulit menerima perubahan, mereka tidak mampu untuk mengikuti perubahan baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi kemajuan ekonomi. Mutu SDM yang rendah akan berdampak pada rendahnya tingkat keterampilan dan penguasaan teknologi. Individu ataupun kelompok masyarakat yang mengalami kondisi ini akan selalu menjadi objek pembangunan dan sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi subjek yang berperan secara aktif dalam pembangunan.

c. Pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk melancarkan dan mensukseskan pencapaian berbagai tujuan dan keinginan di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kebodohan. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antardaerah dan antara kabupaten/kota. Peningkatan ini hendaknya tidak saja melalui kuantitas tetapi juga kualitasnya yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan dapat mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dan potensi sumberdaya alam (SDA) secara optimal dan dapat mengeliminasi kesenjangan antarkelompok masyarakat, antarwilayah kabupaten/kota, serta antara pedesaan dengan perkotaan. Semuanya ini akan semakin mengangkat derajat, harkat, martabat dan marwah rakyat di daerah pedesaan karena eksistensinya akan semakin diakui dan diperhitungkan dalam konteks persaingan global.

Pembinaan terhadap kelembagaan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal, seperti koperasi, usaha kecil dan menengah serta usaha mikro lainnya, harus dikembangkan guna terwujudnya struktur perekonomian yang kuat dengan didukung oleh ekonomi rakyat yang tangguh. Untuk mendukung mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan, dibutuhkan dukungan kebijakan dalam bentuk:

- a. memberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur masyarakat dengan pengembangan perencanaan pembangunan yang komprehensif/partisipatif, demokratis, aspiratif dan transparan;

- b. melakukan restrukturisasi dan redistribusi kepemilikan asset produktif kepada masyarakat pedesaan dengan memakai standar skala ekonomi keluarga sejahtera (3 ha/KK);
- c. melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan forestry (dengan Peraturan Daerah) sebagai investor di pedesaan untuk melakukan reinvestasi melalui kemitraan pola perusahaan patungan bersama pemerintah dan masyarakat pedesaan dalam membangun sistem perekonomian pedesaan;
- d. mengembangkan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro lainnya dengan cara peningkatan dan pengembangan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan;
- e. mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan bidang-bidang lainnya yaitu bidang industri, pertanian dalam arti luas, bidang transportasi, perdagangan, pariwisata serta bidang kelautan yang cukup strategis sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah;
- f. meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur terutama perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan barang;
- g. mendorong upaya peningkatan nilai tambah (value added) sebagai produk pertanian yang dihasilkan oleh petani di pedesaan melalui sistem agribisnis dan agroindustri yang menekankan pada upaya pengembangan berbagai industri turunan;
- h. memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat di pedesaan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan masyarakat miskin serta mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro dalam rangka mendekatkan masyarakat pada akses permodalan guna mengembangkan ekonomi kerakyatan.

PENUTUP

Kesejahteraan masyarakat pada hakekatnya merupakan tujuan pembangunan nasional, seperti halnya Negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menanamkan kewarganegaraan pada rakyat, dan ikut menegakkan ketertiban dunia. Pembangunan desa

tertinggal merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan desa dengan masyarakat pedesaan yang kualitas hidupnya setara atau tidak jauh dengan masyarakat Indonesia lainnya menjadi desa yang maju dengan masyarakat pedesaan. Komunitas ini saat ini memiliki berbagai masalah sosial ekonomi dan keterbatasan fisik.

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar di daerah pedesaan rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pedesaan dengan lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia.

Sejalan dengan pengembangan ekonomi Indonesia yang bertumpu kepada ekonomi kerakyatan, maka pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi harus berbasis kerakyatan. Pembangunan ekonomi terutama di pedesaan dalam rangka mengangkat marwah, derajat, harkat, martabat masyarakat pedesaan sebagai upaya mewujudkan program pengetasan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang mobilitas barang dan penduduk desa-kota. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan ketiga aspek: a) Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan). b) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pengetasan Kebodohan). c) Pembangunan Infrastruktur

DAFTAR PUSTAKA

- A. dkk Muthalib, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara)," 2016.
- A. Puspasari, Amelia dan Koswara and Yudhi, "Arahan Pengembangan Desa Tertinggal Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur," *J. Tek.*, 2016.
- B. Kurniawam, "Desa Mandiri, Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta," 2015.
- A. Soleh, "Strategi Pengembangan Potensi Desa," 2017.

- M. E. Atmojo, “Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo,” *J. Sos. Polit.*, 2017.
- S. Kancana, “Scenario Planning Sebagai Alat Formulasi Strategi,” *J. Adm. Bisnis*, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- M. K. Alim, “Negara Vs. Kemiskinan di Pedesaan.” 2017.
- A. Syahza, “Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau. Penelitian Fundamental DP2M. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.” 2007.
- O. R. Santoso, Eko Budi dan Putri, “Pengembangan Daerah Tertinggal (Underdevelopment Region) di Kabupaten Sampang,” *J. Tek.*, 2012.
- Anonimous, “Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun 2015-2019. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.” 2015.
- Tobirin, “Formalitas dan Simbolisasi Politik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan,” 2013.